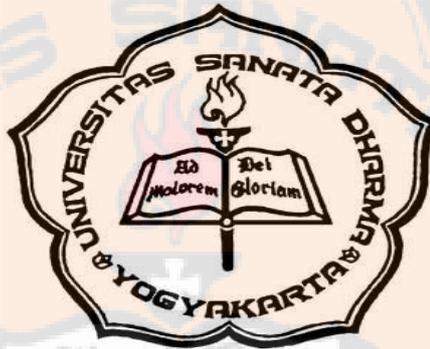


**PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DARI
ZAMAN DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI ORDE BARU**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Sejarah Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

JAKA SUJATMIKA

071314032

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

MAKALAH

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DARI ZAMAN
DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI ORDE BARU

Oleh:

JAKA SUJATMIKA

NIM: 071314032

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing



Drs. A.K. Wiharyanto, M.M

Tanggal 25 Agustus 2012

MAKALAH
PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DARI ZAMAN
DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI ORDE BARU

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Jaka Sujatmika

NIM: 071314032

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 31 Agustus 2012

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

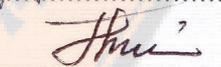
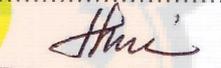
Tanda Tangan

Ketua : Indra Darmawan, S.E., M.Si

Sekretaris : Dr. Th. Sumini, M.Pd

Anggota : Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

Anggota : Dr. Th. Sumini, M.Pd



Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Rohandi. Ph.D

MOTTO

**Jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah)
(Soekarno)**

**Mulailah menggarap sedikit demi sedikit ide yang ada dalam pikiran Anda,
jangan jadikan ide tersebut hanya sebatas wacana.**

**Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, sedangkan berpikir tanpa belajar adalah
berbahaya**

(Mario Teguh)

**sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.**

(Evelyn Underhill)

**Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama
untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri.**

(Martin Vanbee)

**Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.**

Mereka tidak menyalakan waktu untuk menunggu inspirasi.

(Ernest Newman)

PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada:

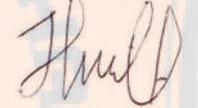
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada ku,
2. Kedua orangtuaku Bapak Dadiyo, BA dan Ibu Darmi Sukesih, yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
3. Kakak-kakakku yang telah mendukung saya dalam mengerjakan makalah ini
4. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2007 terima kasih atas bantuan dan kerjasama kalian selama ini,
5. Para pendidik dan para sahabat-sahabatku di Pendidikan Sejarah.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

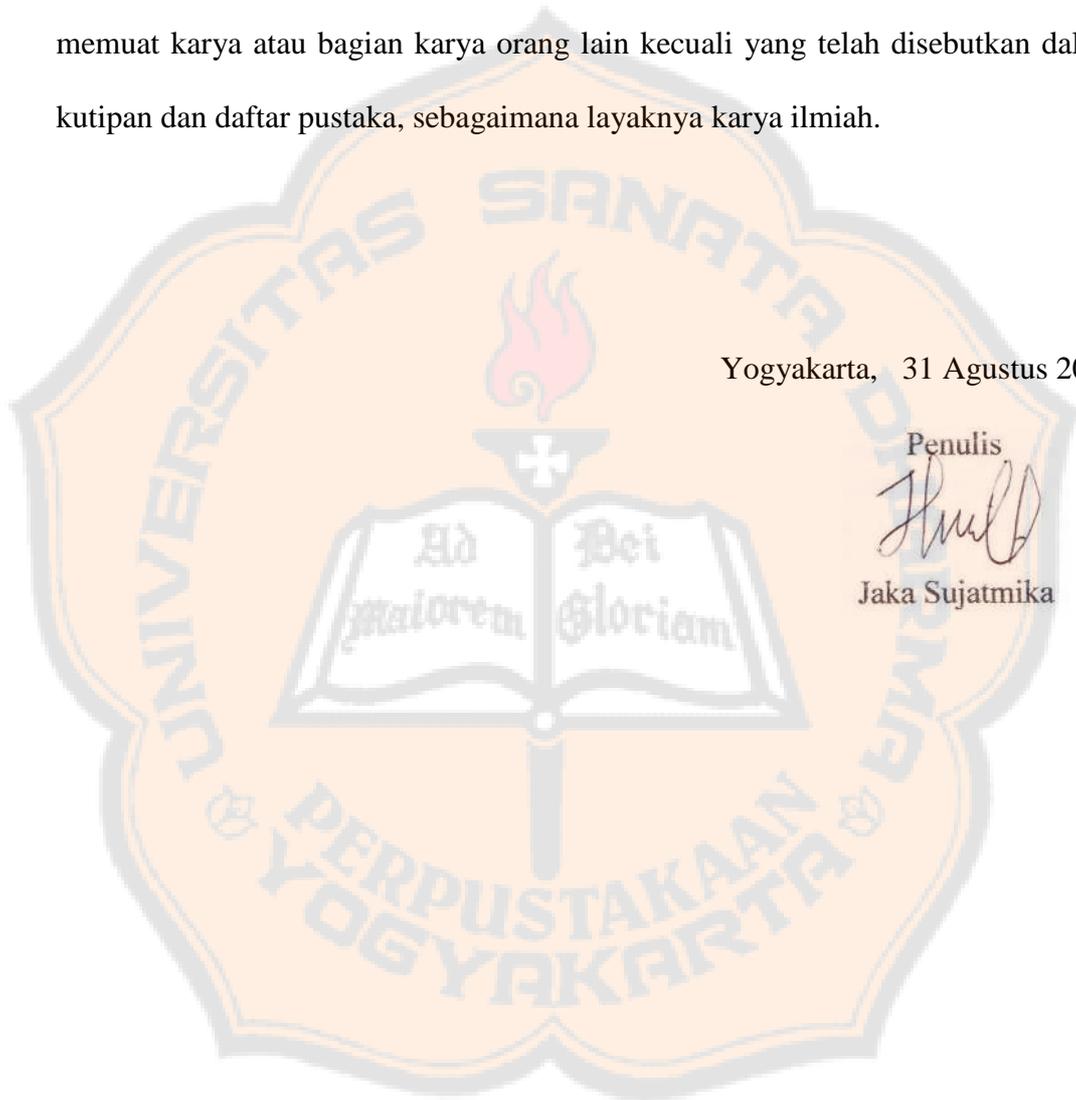
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Penulis



Jaka Sujatmika



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Jaka Sujatmika

Nomor Mahasiswa : 071314032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DARI ZAMAN
DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI ORDE BARU**

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2012

Yang menyatakan



(Jaka Sujatmika)

ABSTRAK
PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI MASA DEMOKRASI
LIBERAL SAMPAI ORDE BARU

Jaka Sujatmika
Universitas Sanata Dharma
2012

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga permasalahan pokok, yaitu: 1) Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal; 2) Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin; 3) Perkembangan partai politik pada masa Orde Baru

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi dengan pendekatan sosial politik dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penulisan ini menunjukkan: 1) Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal ditandai dengan terjadinya perbedaan ideologi-ideologi antar partai politik, mengenai pelaksanaan pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia; 2) Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan kejayaan PKI di bawah kekuasaan Presiden Soekarno dan merupakan masa berakhirnya kekuasaan partai-partai; 3) Perkembangan partai politik pada masa Orde Baru ditandai dengan kejayaan Golkar dan menempatkan Presiden Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun.

ABSTRACT
**THE DEVELOPMENT OF POLITICAL PARTIES FROM LIBERAL
DEMOCRACY TO NEW ORDER ERA**

Jaka Sujatmika
Sanata Dharma University
2012

This paper aims to describe three problems. They are: 1) The development of political parties in Liberal Democratic era, 2) The development of political parties during the Guided Democracy, and 3) The development of political parties in New Order era.

The study was conducted by using a historical method that includes five stages, namely formulating the title, collecting the sources, verifying (sources criticism), interpreting and conducting historiography with social-political approach and being written in a descriptive analysis.

There are three results of this study. They are: 1) The development of political parties in Liberal Democratic era was marked by the difference of ideologies between political parties, concerning the election and the impacts on the lives of democratic life in Indonesia. 2) The development of political parties in the Guided Democracy period was marked by the triumph of PKI under the rules of President Sukarno and the end of the rules of parties. 3) The development of political parties in New Order era was marked by the triumph of Golkar party and the placement of President Suharto as a president for 32 years.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI MASA DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI ORDE BARU”**. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari batuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.
3. Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M. M., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan makalah ini.
4. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan makalah ini.
6. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.

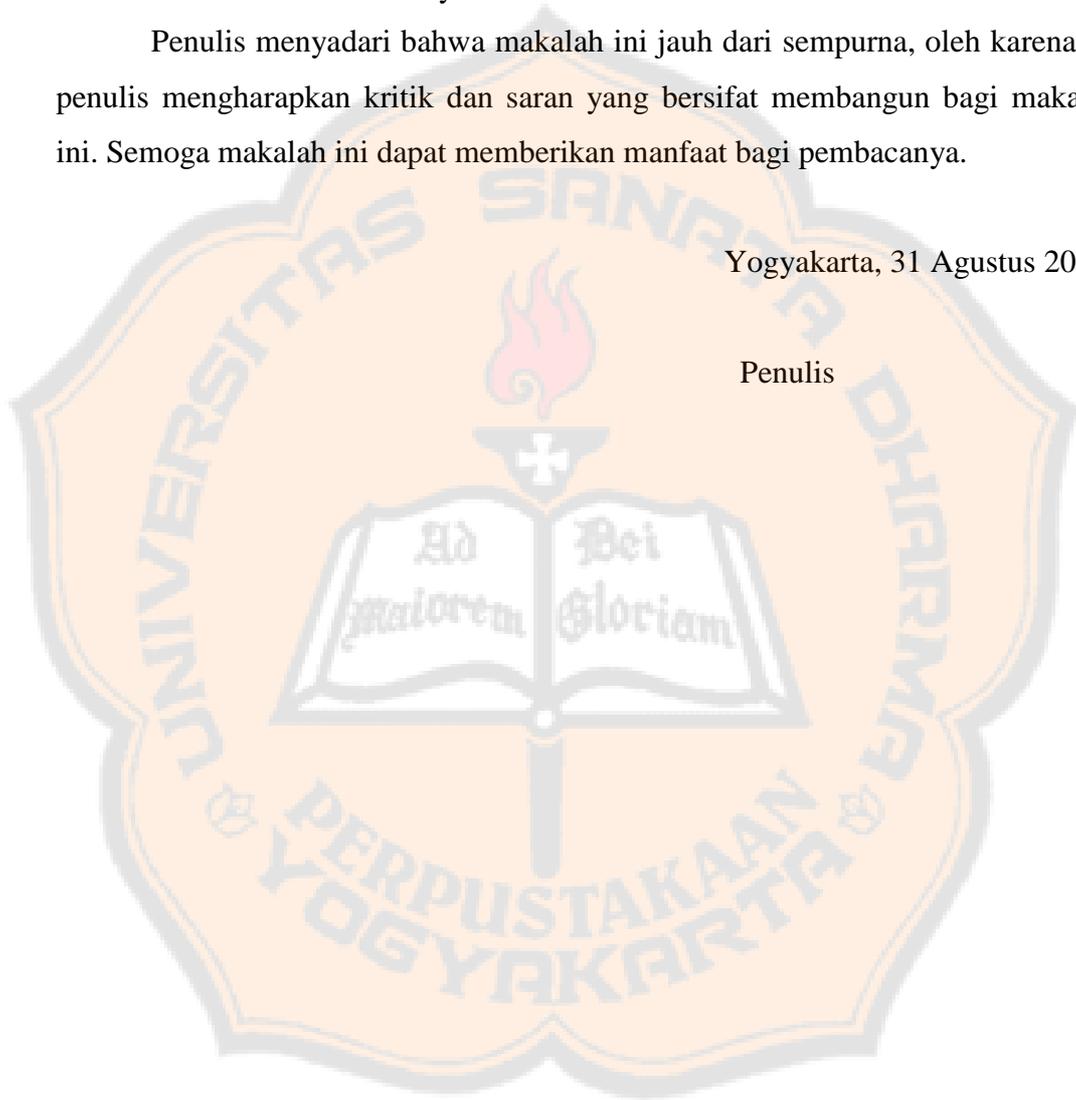
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2007 yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan makalah ini,
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Penulis

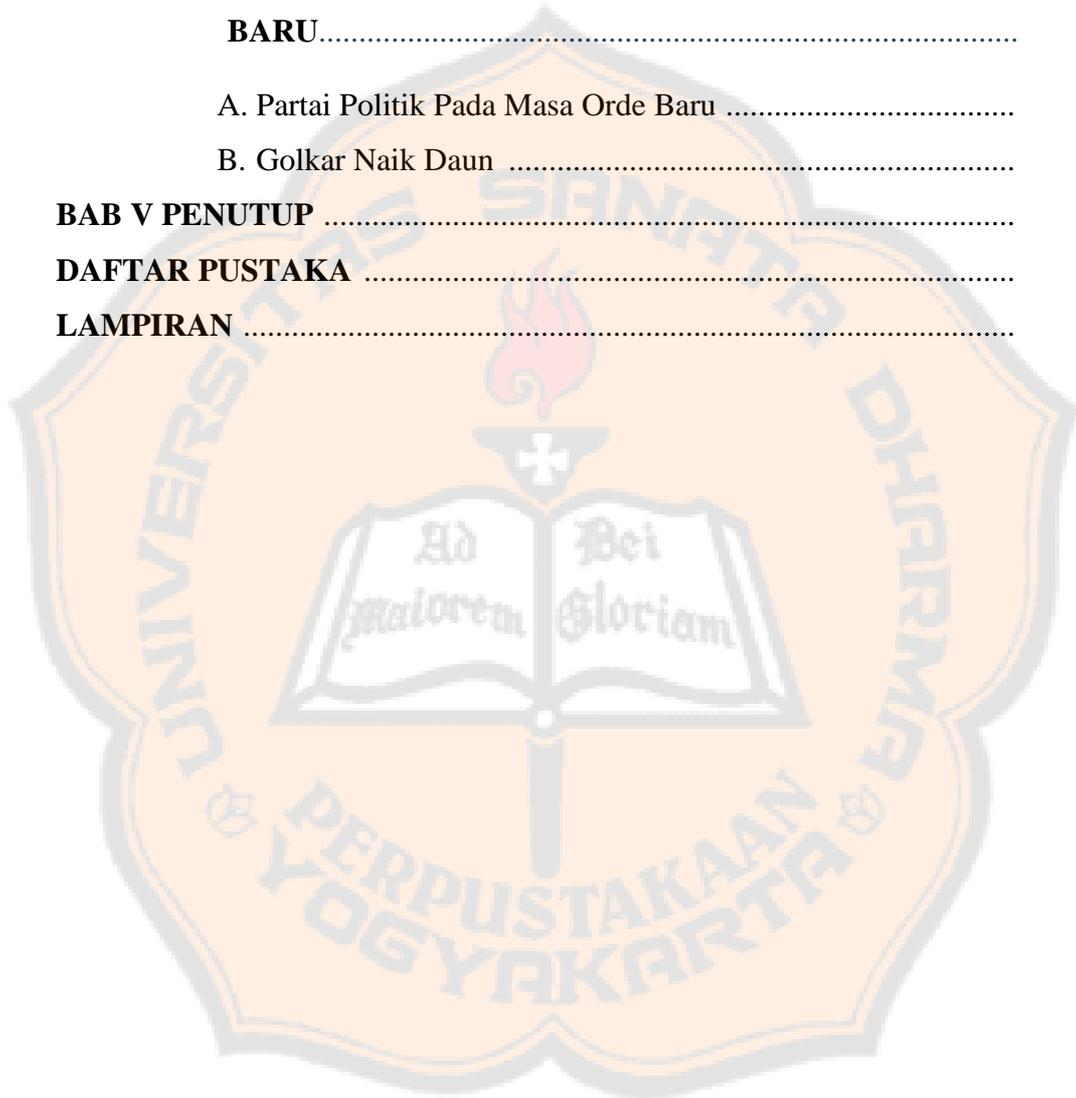


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL	7
A. Tumbuh Suburnya Partai Politik.....	7
B. Pelaksanaan Pemilu dan Dampaknya.....	9
BAB III PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN	13
A. Dekrit Presiden	13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kejayaan PKI	14
C. Berakhirnya Kekuasaan Partai-Partai.....	16
BAB IV PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU.....	22
A. Partai Politik Pada Masa Orde Baru	22
B. Golkar Naik Daun	25
BAB V PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35



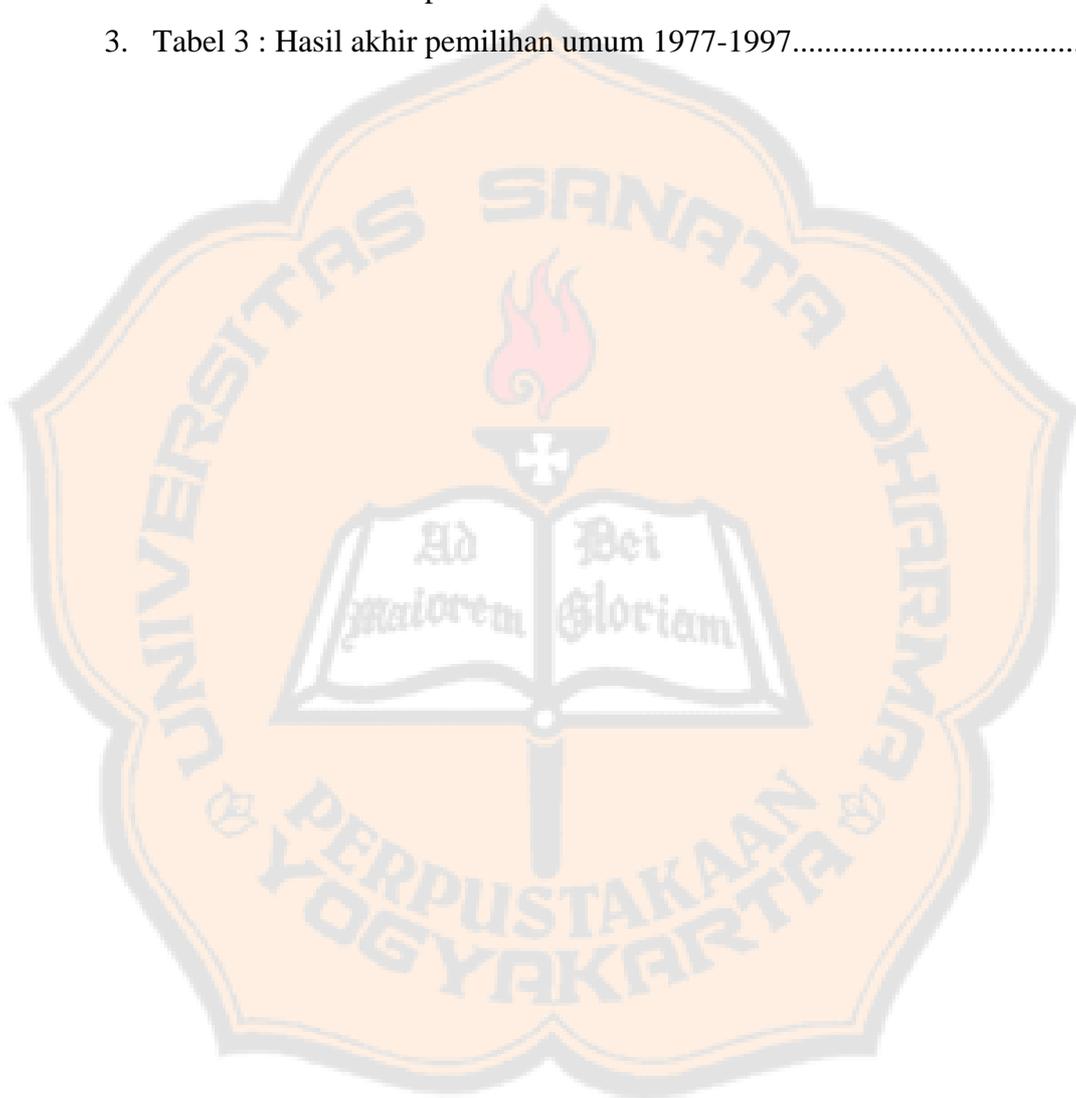
DAFTAR LAMPIRAN

SILABUS 36
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 38



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Hasil akhir pemilihan umum 1977..... 26
2. Tabel 2 : Hasil akhir pemilahan umum 1977..... 28
3. Tabel 3 : Hasil akhir pemilihan umum 1977-1997.....29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Membahas masalah perkembangan partai politik di Indonesia tidak bisa lepas dari asal mula kemunculan partai politik itu sendiri. Negara-negara Eropa Barat menjadi pelopor lahirnya partai politik. Seperti di negara-negara yang lain, partai politik di Indonesia mengalami masa-masa kejayaan dan masa kemunduran. Partai politik dijadikan alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat, namun sering pada realita kehidupan, partai politik banyak digunakan untuk mencapai kepentingan individu ataupun kepentingan golongan.

Di Indonesia partai politik pertama-tama lahir pada Zaman Kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran Nasional. Organisasi politik, seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam memainkan peranan penting dalam berkembangnya pada Pergerakan Nasional.¹

Setelah Indonesian mendapatkan kemerdekaan dari penjajah, maka terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan organisasi atau partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Dengan demikian Indonesia menganut sistem banyak partai atau multi partai. Pada pemilu 1955 muncullah 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Pada tahun 1950 sampai 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara

¹ Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.423

melalui sistem parlementer. Sistem multi partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa Demokrasi Parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mulailah masa Demokrasi Terpimpin.

Dalam kehidupan berbangsa, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Partai-partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.²

Partai politik juga mempunyai fungsi sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara guna memperjuangkan kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena sebagai bahan untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu warga negara juga dilibatkan dalam proses pembuat keputusan politik.

Di negara-negara berkembang, partai politik mengalami hambatan-hambatan akibat berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang dan tingkat buta huruf yang tinggi.

² *Ibid*, hlm. 397

Hal ini merupakan faktor yang memberatkan perkembangan partai politik khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang.³

Tumbuh dan berkembangnya partai politik khususnya perkembangan partai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim penguasa. Penguasa pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah yang memegang kendali jalannya politik. Nyata benar bahwa, perkembangan partai politik sangat dipengaruhi oleh penguasa yang kuat. Di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terbukti bahwa partai politik sengaja ditekan dan dibatasi perannya. Selanjutnya di masa Orde Baru partai politik mendapatkan sedikit nafas segar walaupun pada perkembangannya terjadi ketidakberesan dalam pemilihan umum. Namun setidaknya demokrasi bisa sedikit dipraktekkan dengan adanya pemilihan umum. Sangat berbeda sekali dengan pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya yang sama sekali tidak diperkenankan adanya pemilu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalahnya, antara lain :

1. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal ?
2. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin?
3. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Orde Baru ?

³ *Ibid*, hlm. 413.

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
2. Mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin.
3. Mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Orde Baru.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan disumbangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan sosial dan sejarah pada khususnya tentang Perkembangan Partai Politik di Indonesia.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berguna bagi pembaca mengenai Perkembangan Partai Politik di Indonesia dan juga dapat menambah koleksi kepustakaan khususnya karya ilmiah dan dapat menjadi bahan referensi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang Perkembangan Partai Politik di Indonesia dari Zaman

Demokrasi Liberal Sampai Orde Baru dan juga dapat dijadikan sarana untuk menerapkan teori yang telah diharapkan selama pada saat kuliah.

4. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia khususnya Perkembangan Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal hingga Orde Baru.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang “Perkembangan Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Sampai Orde Baru” terdiri dari 5 bab, antara lain :

- a. Bab I :Berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan
- b. Bab II :Membahas perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
- c. Bab III :Membahas perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin
- d. Bab IV :Membahas perkembangan partai politik pada masa Orde Baru
- e. Bab V :Berupa kesimpulan dari Bab II, III, dan IV

Demikian pendahuluan dalam tulisan ini. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penulis ingin membuat suatu tulisan mengenai Perkembangan Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Sampai Masa Orde Baru. Untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada di bahas dalam bab-bab selanjutnya.



BAB II

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL/PARLEMENTER

A. Tumbuh Suburnya Partai Politik

Sejarah Indonesia pasca perang kemerdekaan sampai Reformasi (1988) dibagi menjadi tiga periode atau rezim. Pertama, periode Demokrasi Parlementer atau periode berkuasanya kabinet. Periode ini berlangsung sejak penyerahan keadulatan pada akhir 1949 sampai runtuhnya wewenang parlemen menjelang 1957. Kedua, periode Demokrasi Terpimpin atau berkuasanya Presiden, yakni sejak diumumkannya Dekrit Presiden pada Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sampai waktu dibunuhnya para jenderal dan dihancurkannya PKI pada 1965. Ketiga, periode Orde Baru Presiden Soeharto dengan dominasi Angkatan Darat, yang berlangsung 1965 sampai 1998¹.

Periode Demokrasi Parlementer merupakan salah satu iklim politik yang benar-benar memberikan angin segar bagi tumbuhnya partai politik. Hal ini terlihat dengan banyaknya partai-partai politik yang bermunculan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga berumunculanlah partai politik di Indonesia. Dalam Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Eropa Barat ini kebebasan individu terjamin. Masyarakat bebas akan membuat organisasi-organisasi bahkan mendirikan dan bergabung dalam partai politik karena kebebasan mereka

¹ William Liddle, 1992, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.175

terjamin. Akan tetapi, sistem Demokrasi Parlementer ini sebenarnya kurang tepat diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan persatuan yang terjalin selama menghadapi perlawanan-perlawanan dari musuh-musuh menjadi kendor dan tidak dapat terjalin menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai.

Munculnya golongan-golongan cendekiawan pada masa itu mempunyai peranan yang besar, yaitu karena mereka menduduki jabatan pemerintahan, sebagai perumus kebijaksanaan, menteri kabinet, pegawai negeri, kelompok penalar dan lain-lain serta ada juga yang memegang peranan penting di dalam partai politik². Namun, kemunculan golongan cendekiawan ini tidak sepenuhnya diterima, kebutuhan akan golongan cendekiawan mulai merosot karena dipengaruhi beberapa faktor, banyak kaum cendekiawan melihat diri sebagai pengecam tindakan-tindakan pemerintah dan bukan sebagai peserta langsung. Hal inilah yang menjadikan pertentangan-pertentangan di antara partai politik. Perbedaan ideologilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pertentangan antar partai politik tersebut. Ideologi yang tujuan utamanya sebagai penggerak masyarakat untuk mencapai gambaran masyarakat yang dicita-citakan ternyata tidak dapat tercapai pada saat itu.

Mengenai perkembangan partai politik pada Demokrasi Parlementer ini sebenarnya partai politik mempunyai peran yang sangat besar sekali. Antara partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat saling ketergantungan karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berasal dari orang-orang partai. Namun,

² Muhammad Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV.Rajawali, hlm.108

perselisihan antar partai politik yang mengakibatkan juga pada hubungan antar politisi yang tidak harmonis karena hanya mementingkan kepentingan partai politik sendiri.

B. Pelaksanaan Pemilu dan Dampaknya

Kegiatan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi pada awal-awal kemerdekaan belum bisa dilaksanakan karena Indonesia masih dihadapkan pada persoalan-persoalan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih karena pihak Belanda masih berusaha untuk masuk dan menguasai Indonesia.

Dasar dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia terdapat pada Undang-Undang dasar 1945 yaitu : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Kegiatan pemilu pada masa Demokrasi liberal dilakukan pada 29 September 1955. Kesulitan dalam mengadakan pemilihan umum ini lebih dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kegiatan pemilu. Setelah adanya Rencana Undang-Undang pemilihan umum yang diserahkan kepada Parlemen pemilihan umum yang pertama pada Demokrasi Liberal bisa dilaksanakan. Hasil pemilu tahun 1955 menghasilkan penyederhanaan partai politik. Partai politik yang dapat bertahan merupakan partai politik yang besar yaitu Masyumi (57 kursi), PNI (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi).

Mengenai sistem partai politik di Indonesia, M. Karim Rusli mengatakan:

“Sistem partai di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing lagi bagi sistem multi partai di dunia.

Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada dukungannya dalam masyarakat; disamping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh seperti yang biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Lagi pula sistem parlementer (di Indonesia) tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata tertib politik, dan juga tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan ekstra parlementer seperti presiden dan tentara. Akan tetapi partai politik juga tidak luput dari tantangan dari kalangan mereka sendiri. Dan hal ini juga membantu timbulnya Demokrasi Terpimpin³.”

Perjalanannya, sistem multipartai di Indonesia ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Perpecahan partai politik tidak dapat terhindarkan lagi. Perpecahan mengenai ideologi antara kekuatan paham nasionalisme berhadapan dengan aliran Islam atau mengenai dasar negara Pancasila dan ciri khas Islam. Pertentangan sengit ini terjadi antara Masyumi dengan PKI

Perpecahan antar partai politik juga mempunyai imbasnya pada pada lembaga formal negara (kabinet) selama periode Demokrasi Liberal dengan dimulai berlakunya UUDS 1950, yakni diawali dengan Kabinet Natsir (Masjumi) sampai berakhirnya masa kabinet Ali Sastroamdjoko (PNI) II menunjukkan kenyataan berikut. Pada masa pimpinan Natsir dan Burhanuddin Harahap (Masyumi) sama sekali tak ada menteri dari PNI. Sebaliknya dalam kabinnet Ali Sastroamidjojo I dan II tidak ada menteri dari Masjumi. Sedangkan dalam kabinet Sukiman (Masjumi) dan kabinet Wilopo (PNI) terdapat perimbangan sebagai

³ *Ibid*, hlm, 123

berikut: 5 : 4 dan 4 : 4 untuk Masjumi atau bisa dikatakan Masjumi dan PNI mempunyai jatah menteri yang hampir sama. Pada masa kabinet dipimpin Masjumi (tanpa PNI), Masjumi masing-masing menduduki empat kursi sedangkan pada masa kabinet PNI (tanpa Masjumi), PNI menduduki 4 dan 6 kursi kabinet.⁴

Jatuh banggunya partai politik dalam pemerintahan ini, pada perkembangan selanjutnya dijadikan alat untuk melumpuhkan partai politik yang tidak sehaluan dengan Soekarno. Dilain pihak keadaan negara yang semakin kacau mendorong dipercepatnya kehadiran militer dalam sistem politik Indonesia. Hadirnya Kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda pada tahun 1957-1959 berarti telah dimulainya era baru politik Indonesia atau bisa juga disebut peralihan Demokrasi Parlemen ke Demokrasi Terpimpin. Kabinet ini bertujuan untuk melakukan stabilitas politik. Hal ini terlihat dari pemimpin kabinet ini yang tak berpartai, maka menteri yang ada dalam kabinet juga dipilih dengan adil. Dari 30 kursi dalam kabinet hanya ada 10 orang tokoh partai politik, jadi tidak adanya dominan tokoh-tokoh partai politik tertentu yang duduk dalam kabinet.

Masa Demokrasi Liberal ini dapat dijadikan contoh bagaimana partai politik pada saat itu memang menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk diajarkan pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan mereka tentang bagaimana berpolitik, selain itu kehidupan mereka yang masih serba kekurangan juga dapat menjadi alasan mengapa partai politik sangat sulit untuk diterima di masyarakat.

⁴ *Ibid*, hlm. 130.

Pendirian partai-partai politik dan dilaksanakannya pemilu pertama kali pada masa Demokrasi Liberal ini dapat menunjukkan bagaimana perkembangan partai politik yang sangat signifikan dibandingkan pada saat awal kemerdekaan bahkan pada saat masa penjajahan, karena pada saat itu organisasi-organisasi yang berbau politik hampir tidak ada.



BAB III

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI

TERPIMPIN

A. Dekrit Presiden

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD¹. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dkk., *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1993

Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.

B. Kejayaan PKI

Pada masa pemerintahan Soekarno yaitu tepatnya pada masa Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami masa kejayaannya. PKI mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan partai Komunis pada waktu itu mendapatkan angin segar dan dukungan dari Soekarno yang merupakan sebagai Presiden.

Sebagai pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno mengistimewakan PKI sedangkan partai-partai yang lain di tempatkan sebagai pemain pinggir atau kurang mendapat perhatian lebih seperti PKI. Dapat dikatakan bahwa, masa Demokrasi Terpimpin merupakan suatu masa terberat bagi kelompok-kelompok politik penentang.² Dengan kata lain siapa yang kontra dengan pemikiran presiden maka, pihak yang kontra tersebut tidak mendapatkan tempat dan tersingkir. Partai-partai politik yang tidak sehaluan dengan Soekarno di anak tirikan. Sebaliknya partai politik yang sehaluan, yang sepikiran pasti mendapatkan peluang yang besar dalam mencapai tujuan politiknya.

Membicarakan mengenai Demokrasi Terpimpin di Indonesia, tidak lepas dari tokoh Soekarno. Pengaruh kekuasaan Soekarno sebagai presiden sangat besar. Pada masa itu pemerintahan didominasi oleh Soekarno, bersama militer dan Partai Komunis Indonesia. Soekarno menganggap bahwa, partai politik yang

² Muhammad Rusli Karim, *op.cit*, hlm.XIII.

berjumlah banyak dan ketidakmampuan partai politik dalam mengatur jalannya pemerintahan telah menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat badan eksekutif dimulailah beberapa ikhtiar untuk menyederhanakan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti, sedangkan beberapa partai lain dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 yang tersisa tinggal sepuluh partai politik saja.³ Hal ini dimaksudkan agar peran partai politik dalam pemerintahan menjadi berkurang. Dengan berkurangnya peran partai politik kecuali PKI dan berkurangnya pengaruh maka, Soekarno dapat dengan leluasa melebarkan sayapnya dan memuluskan pemerintahan otoriterinya.

Pada tahun 1960 Pemerintah juga membentuk Front Nasional yang mendasarkan pada NASAKOM (Nasioanalis Komunis) sebagai wadah yang berguna untuk memobilisasi semua kekuatan politik di bawah pengawasan pemerintah. PKI semakin berhasil mengembangkan sayapnya dan dapat mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan politik. Dengan adanya Front Nasional tersebut mengakibatkan melemahkan kedudukan partai-partai politik.

³ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 441.

Presiden Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros NASAKOM Soekarno semasa pemberlakuan Demokrasi Terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

C. Berakhirnya Kekuasaan Partai-Partai

Pada masa Demokrasi Terpimpin, semakin tampak besar kekuasaan Soekarno dalam mengatur politik. Kegagalan pada era sebelumnya yaitu di masa Demokrasi Liberal atau Parlementer dijadikan senjata yang ampuh untuk mengikis partai-partai. Gejolak politik yang semakin mengalami kekacauan semakin mendorong Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik.

Terbukti bahwa, adanya keinginan yang kuat dari militer untuk langsung tampil di arena politik dapat mendorong untuk mengurangi jumlah partai politik. Bahkan dua partai utama yaitu Masyumi dan PSI semakin dikucilkan oleh Soekarno. Pada kurun waktu 1959-1965 terdapat tiga pemegang kekuasaan yang bersaing yaitu; Soekarno, PKI, dan TNI-AD, sedangkan partai-partai yang lain larut dan tenggelam karena dibayangi pemegang kekuasaan tersebut.⁴

⁴ Muhammad Rusli Karim, *op.cit*, hlm.10.

Partai politik semakin dibatasi dan merasa terpenjara di dalam ruangan perpolitikan Indonesia. Percaturan politik yang semakin sengit merugikan perkembangan partai politik selanjutnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan yang berat dari pihak penguasa. Maka dari itu perkembangan partai politik jelas terhambat dan tersendat-sendat.

Terjadinya gejolak konflik dan ketidakstabilan konflik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal mendorong adanya ide untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Tidak hanya itu, terjadinya pertikaian antara partai politik yang menyebabkan kabinet sering jatuh bangun membuat Soekarno mencoba system yang lain. Soekarno juga mengecam partai politik dan menganggap partai politik tidak perlu.⁵ Kegagalan yang dialami pada masa sebelumnya yaitu masa demokrasi liberal atau yang sering disebut parlementer (banyak partai), dijadikan dasar oleh Presiden Soekarno untuk memotong jumlah partai yang terlalu banyak dan tidak efektif. Akibatnya partai politik disederhanakan menjadi beberapa partai, tujuannya untuk mempersempit ruang gerak partai politik.

Semasa Demokrasi Terpimpin peta politik Indonesia berubah secara drastis. Partai-partai semakin kehilangan peranannya kecuali PKI yang pada waktu itu dekat dengan Soekarno selaku sebagai Presiden. Soekarno semakin keras berkeinginan untuk lebih memperbesar kekuasaannya. Maka dari itu partai politik yang tidak sepaham dengan pemikirannya dilumpuhkan. Masa jatuh-

⁵*Ibid*, hlm.117.

bangun partai politik dalam pemerintahan, dijadikan senjata untuk melumpuhkan partai politik yang tidak sehaluan dengan Soekarno.⁶

Pada masa Demokrasi Terpimpin peranan parlemen juga semakin berkurang dan akhirnya beralih ke tangan Soekarno sebagai Presiden. Bahkan Soekarno sangat anti Barat atau Amerika Serikat, sehingga pada era atau puncak kekuasaannya Indonesia tertutup dari dunia luar. Hal ini yang dapat merugikan Indonesia pada dunia Internasional. Indonesia tidak mempunyai nama dan relasi dengan pihak luar negeri, sehingga berkurangnya simpati pihak luar negeri terhadap Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin partai politik tampak tidak berdaya. Demokrasi Terpimpin dapat dilambangkan sebagai pemerintahan sewenang-wenang. Banyak orang mengatakan bahwa, Demokrasi Terpimpin ternyata yang ada hanya terpimpinnya, sedangkan demokrasiya terkubur. Rakyat tidak bisa leluasa atau bebas untuk berpendapat karena mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Baik Soekarno maupun Demokrasi Terpimpinnya ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dasar yaitu perpecahan politik dan ideologis. Pada Demokrasi Terpimpin justru semakin memburuk suatu keadaan di bidang ekonomi.⁷

Pengaruh serta kekuasaan sebagian besar partai politik semakin surut ketika parlemen dan pemerintah sipil secara umum jatuh. Pada tahun 1960 partai Masyumi dan PSI mendapat pukulan keras dan akhirnya kedua partai tersebut secara resmi dilarang, sehingga peran partai semakin sempit dengan hilangnya

⁶*Ibid*, hlm. 132.

⁷*Ibid*, hlm. 142.

kedua partai politik tersebut. Pada umumnya partai politik hanya memainkan peranan di belakang layar dalam politik nasional.⁸

PKI merupakan salah satu partai yang mempunyai hubungan dekat dan dilindungi oleh Presiden Soekarno. Pada tahap selanjutnya yaitu periode 1963-1965, PKI menjadi peran utama dalam kehidupan politik. Pemikiran atau ideologi presiden Soekarno semakin sejalan dengan rumusan dan kedudukan PKI. Maka dari itu PKI semakin kuat pada waktu itu. Hal ini mengakibatkan adanya persaingan antara Angkatan Darat dan PKI, sedangkan partai politik lain menjadi semakin tenggelam.⁹

Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950. Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konstitusi Presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari Angkatan Darat.

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia.

⁸ William Liddle, 1992, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.184.

⁹ *Ibid*, hlm. 187.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.

Semenjak diperkuatnya kedudukan presiden melalui TAP MPR No.III/1963 yaitu penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, maka Soekarno lebih leluasa melebarkan sayapnya. Soekarno ternyata sering memaksa golongan-golongan politik untuk tunduk pada pikiran-pikirannya. Tidak hanya itu, Soekarno juga menyingkirkan orang-orang yang tidak sepeham dengan pola pikirannya. Dengan demikian maka Soekarno dapat leluasa memerintah negara Indonesia tanpa adanya saingan dari pihak-pihak lain¹⁰. Begitu banyak keputusan-keputusan Soekarno yang dianggap otoriter karena pembuat keputusan tersebut berasal dari Soekarno itu sendiri tanpa memikirkan dari pihak lain, maka Soekarno dapat dikatakan sebagai seorang presiden yang otoriter walaupun

¹⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 441.

dengan caranya tersebut bangsa Indonesia mengarah ke hal yang lebih bagus. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya perpecahan yang muncul akibat perpecahan partai politik tersebut. Penyederhanaan partai politik dianggap cara yang sangat efektif untuk mencegah perpecahan partai politik.



BAB IV

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU

A. Partai Politik Pada Masa Orde Baru

Memasuki masa pemerintahan Soeharto yaitu Orde Baru, partai politik di Indonesia sedikit mendapatkan angin segar. Walaupun terdapat permainan politik dengan dibatasi dan pada akhirnya disederhanakan, namun partai politik masih diperbolehkan berkembang. Pada masa ini terjadi pemilu 6 kali. Sangat berbeda dengan masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang tidak adanya pemilihan umum.

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Dengan demikian partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Partai politik merupakan pilar dalam sistem politik demokratis. Kehidupan politik pada masa-masa Orde Baru tidak diwarnai pertarungan ideologis. Deideologisasi yang dianut Orde Baru didasari oleh anggapan bahwa ideologi merupakan penyebab utama ketidakstabilan politik. Kebijakan ini berujung pada

penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga asas atau ideologi partai tidak dikenal saat itu. Implikasinya, kehidupan politik selama Orde Baru menumbuhkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang dianggap tidak lebih sebagai alat kekuasaan negara. Partai politik tidak lagi representatif menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah.

Pada tanggal 27 Juli 1967, pemerintah dan partai-partai politik mencapai suatu kesepakatan. Pemerintah menyetujui sistem pemilihan umum proporsional. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 1967 RUU diterima dengan baik oleh parlemen, kemudian tahun 1971 pemilihan umum yang diikuti oleh 10 partai politik diselenggarakan.¹

Pada masa Orde Baru peranan golongan militer bertambah kuat yang memunculkan pemerintahan otoriter. Penyederhanaan partai dilakukan dengan cara sedikit radikal. Presiden Soeharto menyatakan bahwa, partai politik agar mengelompokkan diri untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai kehilangan identitas masing-masing atau dibubarkan sama sekali. Pengelompokan ini mencakup 3 kelompok, yaitu golongan nasional, golongan spiritual, dan golongan karya.²

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai - partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-

¹ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 443.

² *Ibid*, hlm. 445.

partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan social politik itu adalah :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3. Golongan Karya

Seperti halnya di masa Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Baru juga dilakukan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideology politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Mengenai fusi kepartaian ini, Miriam Budiardjo menyatakan :

“Pengelompokan dalam tiga golongan baru terjadi pada tahun 1973. Empat partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) bergabung dengan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu, lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian mulai pemilihan umum 1977 hanya ada tiga orsospol, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.”³

Selama Orde Baru (1966-1998), partai politik digambarkan sebagai sosok yang asing, karena cenderung hanya mementingkan diri sendiri. Upaya pemujaan

³ *Ibid*, hlm, 446.

diri yang berlebihan menyebabkan pemerintah Orde Baru terlalu terpaku kepada pertumbuhan ekonomi dan pemaksimalan pembangunan fisik dengan sarana hutang luar negeri. Partai-partai politik tidak berkembang, sekalipun jumlah kelompok oposisi terus bertambah secara diam-diam.

B. Golkar Naik Daun

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal tersebut tentunya terdapat peran pihak yang kuat dalam proses kampanye.

Dari awal hingga akhir kekuasaan Orde Baru partai Golkar yang disebut juga sebagai partainya pemerintah selalu memenangkan pemilu yang berlangsung antara tahun 1971 hingga tahun 1997. Tentunya hal tersebut mengundang tanda tanya besar mengapa Golkar selalu menang telak di setiap pemilu. Oleh karena itu sudah sewajarnya perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat membuat Golkar menjadi partai juara.

Hasil akhir pemilihan umum 1971 menunjukkan sebagai berikut :⁴

Partai	Jumlah suara	Kursi	Persentase
Golkar	34.348.673	227	62,8
NU	10.213.650	58	18,67
Parmusi	2.930.740	24	7,365

⁴ Muhammad Rusli Karim, *op.cit*, hlm. 170.

PNI	3.793.266	20	6,94
PSII	1.308.237	10	2,39
Parkindo	745.359	7	1,34
Katholik	605.740	3	1,11
P.I. Perti	381.309	2	0,70

Tabel 1 : Hasil akhir pemilihan umum 1977

Hasil Pemilihan Umum tersebut terlihat bahwa Golongan Karya memperoleh suara terbanyak yang otomatis juga mendapatkan jumlah kursi terbanyak di pemerintahan. Seperti yang diketahui bahwa Golongan Karya merupakan partai yang baru ikut dalam pemilihan umum akan tetapi partai tersebut mendapat suara terbanyak, hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Ada beberapa orang berpendapat bahwa kemenangan Golongan Karya ini disebabkan oleh kecurangan, paksaan dan atau karena menggunakan kekuasaan ABRI.

Kemenangan Golongan Karya dalam pemilu tahun 1971 membuat peranan golongan militer semakin kuat dan menimbulkan sebuah rezim otoriter. Hal ini tampak ketika Presiden Soeharto menyatakan agar dilakukan penyederhanaan partai politik dengan tujuan untuk mempermudah kampanye dalam pemilihan umum berikutnya. Sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk memecah belah partai-partai politik yang selama ini sudah berkembang.

Pemilihan umum 1977 hanya ada tiga partai politik yang ikut dalam pemilihan 1977 yaitu PPP, PDI, dan Golkar. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terdiri dari gabungan empat partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarekat Islam Indonesia

(PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Selain dari itu, lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).⁵

Berbagai upaya dilakukan oleh partai-partai politik tersebut untuk dapat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum 1977 dan juga agar memperoleh kursi terbanyak dalam pemerintahan. Salah satu cara agar memperoleh suara terbanyak adalah dengan melakukan kampanye-kampanye politik sampai ke desa-desa.

Masalah kampanye ini, William Liddle menyatakan :

“Meskipun pemilihan umum itu sendiri dilaksanakan dengan penuh kejujuran, taktik kampanye Golkar diwarnai paksaan. Kebanyakan pegawai negeri dan pamong desa dilarang berkampanye untuk partai pilihan mereka sendiri dan diharuskan bergabung dengan dan bekerja untuk Golkar. Para perwira militer menjadi ketua Golkar setempat atau mengawasi para ketua Golkar dari dekat. Daftar para calon partai disaring dan banyak nama dikeluarkan dari daftar pemilihan. Pemimpin-pemimpin partai yang dianggap kurang bersimpati kepada penguasa militer dipaksa keluar dari kedudukan mereka di partai. Di beberapa daerah para pemilih diharuskan mendaftarkan diri sebagai anggota Golkar. Kepada mereka diberitahukan: menentang Golkar berarti menentang pemerintah (atau menentang bangsa), tidak akan ada pekerjaan atau pelayanan pemerintah bagi penentang Golkar.” [...]⁶

Golkar dibentuk dengan tujuan untuk memperlemah partai-partai lama. Pemerintah memaksa partai-partai untuk berfusi menjadi dua partai baru, yaitu PDI dan PPP. Selanjutnya pemerintah membentuk sebuah organisasi masa baru yang berafiliasi dengan Golkar untuk mengimbangi peranan partai-partai.⁷

⁵ *Ibid*, hlm.172.

⁶ William Liddle, *op.cit*, hlm. 195.

⁷ *Ibid*, hlm.197.

Sama halnya dengan pemilihan umum 1971, bahwa Golongan Karya memperoleh suara terbanyak dan juga memperoleh kursi terbanyak dalam pemerintahan. Namun, kemenangan Golongan Karya ini diwarnai beberapa kontroversi atau kecurangan pada saat pemilu yang tidak mendapat penyelesaian. Hal inilah yang membuat kekecewaan dari salah satu wakil dari PPP yang tidak mau menandatangani hasil akhir pemilihan umum. Dengan kemenangan Golongan Karya dan sebanyak 232 orang yang duduk dalam pemerintahan ditambah 100 orang yang diangkat untuk ABRI, maka semakin kuatlah posisi Golkar dalam pemerintahan, melalui Sidang Umum maka Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya.

Kekalahan yang diderita di dalam Pemilihan Umum baik di tahun 1971 maupun 1977 tak menggoyahkan kedua partai politik itu yaitu PPP dan PDI. Semangat mereka tetap menyala-nyala untuk dapat mengalahkan Golkar. Golongan Karya yang semakin mantap tampak tidak pula menunjukkan kekendorannya untuk memberi kelonggaran bagi tumbuh suburnya partai politik.

Hasil akhir pemilihan umum 1977 menunjukkan sebagai berikut:⁸

Partai	Jumlah Suara	Kursi	Persentase
Golkar	39.750.096	232	62,11
PPP	18.743.491	99	29,9
PDI	5.504.757	29	8,6

Tabel 2 : Hasil akhir pemilihan umum 1977

⁸ Muhammad Rusli Karim, *op.cit*, hlm. 183.

Hasil Pemilihan Umum Orde Baru 1977-1997:⁹

Partai	1977	1982	1987	1992	1997
GOLKAR	232	242	299	282	325
PPP	99	94	61	62	89
PDI	29	24	40	50	11
TOTAL	360	360	400	400	425

Tabel 3 : Hasil akhir pemilihan umum 1977-1997

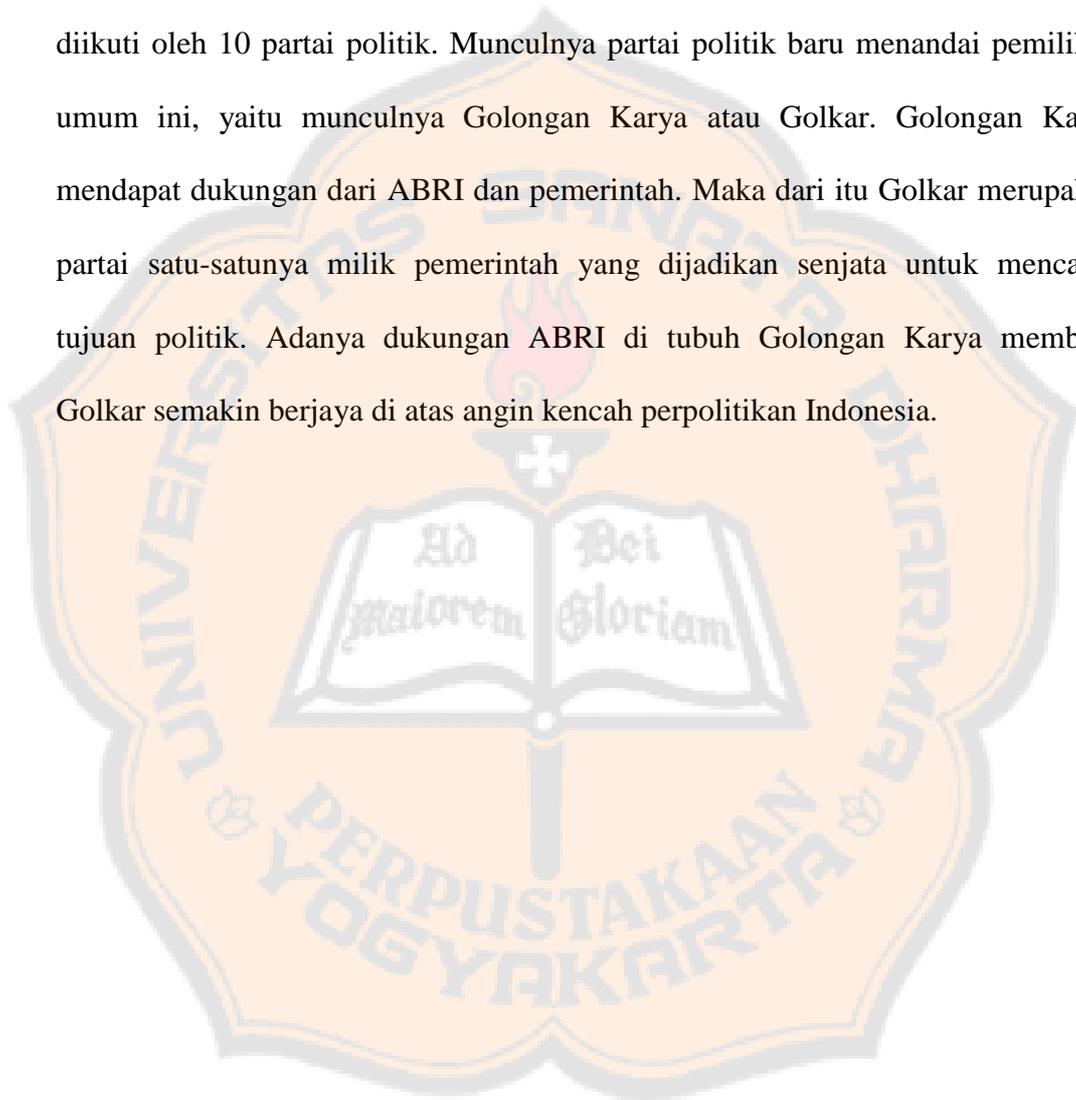
Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh suara mutlak dan PPP menempati posisi ke dua dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara. Hal ini disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDI Perjuangan .

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Namun dalam kenyataannya Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode secara berturut-turut dengan

⁹ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm.447.

kemenangan Golkar, karena pada masa Orde Baru Presiden dipilih oleh anggota MPR bukan dari rakyat.

Pemilihan Umum pada masa Orde Baru dilakukan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik. Munculnya partai politik baru menandai pemilihan umum ini, yaitu munculnya Golongan Karya atau Golkar. Golongan Karya mendapat dukungan dari ABRI dan pemerintah. Maka dari itu Golkar merupakan partai satu-satunya milik pemerintah yang dijadikan senjata untuk mencapai tujuan politik. Adanya dukungan ABRI di tubuh Golongan Karya membuat Golkar semakin berjaya di atas angin kenchah perpolitikan Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN

Partai politik pertama kali lahir dan pelopornya adalah negara-negara Eropa Barat. Partai politik dijadikan alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengolahan negara, akan tetapi pada realita kehidupan bernegara seperti sekarang ini, partai politik sering disalahgunakan untuk mencapai kepentingan golongan. Sebenarnya masa kejayaan partai atau perkembangan partai politik terlihat pada masa demokrasi parlementer. Masa itu terlihat peran partai politik yang begitu dominan.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pada masa Demokrasi Liberal pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Pada tahun 1950 sampai 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem multi partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa Demokrasi Parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa Demokrasi Terpimpin.

2. Partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin secara perlahan peran partai politik menjadi tenggelam. Orde Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Soekarno menganggap partai politik tidak perlu. Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru. Pada pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya menitik beratkan pada 3 gabungan kekuatan yaitu, Soekarno sendiri, militer, dan PKI. Sedangkan pada jaman Orde Baru, hanya memiliki 1 pusat kekuatan yaitu ABRI. Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilai menghambat jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik dibandingkan dengan sistem ala Barat, ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktik pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang didalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun 1950an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula. Dalam penggambaran kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI.

3. Masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi Terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Antara masa Demokrasi Terpimpin dengan Orde Baru sama-sama menunjukkan pemerintahan yang otoriter namun caranya yang berbeda. Pada Orde Baru Golkar sebagai partai pemerintah mempunyai basis yang kuat sebagai partai tunggal yang dibuat dan dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu Golkar dalam setiap pemilihan umum menempati kedudukan paling tinggi dan menjadi partai juara atau pemenang. Di era Demokrasi Terpimpin terjadi perlombaan saling berebut pengaruh terhadap diri Presiden. Nyata benar bahwa, antara PKI dengan Angkatan Darat bersaing untuk memperebutkan pengaruh yang besar. Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kejayaannya karena Presiden Soekarno pada saat itu mempunyai hubungan istimewa dengan PKI. Sedangkan pada masa Orde Baru Golkar yang mendapat perlakuan istimewa serta mendapat hak yang khusus pula. Dengan kata lain Golkar dijadikan sebagai tangan kanan penguasa Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Feith, Herbert, 1995. *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- _____ & Lance Castles, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES
- Liddle, William, 1992, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Marwati Djoened Poesponegoro dkk, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Rustam Ibrahim, 1997, *Mempertimbangkan Kembali Format Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES

LAMPIRAN



SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas : XII
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Belajar	Materi Pokok	Penilaian			Waktu	Sumber/ Bahan/ Alat
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
1. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.	1.1 Kognitif a. Produk <ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan perkembangan partai politik di Indonesia dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru b. Proses <ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Orde Baru 1.2 Afektif a. Karakter <ul style="list-style-type: none"> Menanamkan rasa cinta 	Dengan mengkaji buku dan melakukan diskusi, siswa diharapkan dapat : <ul style="list-style-type: none"> Menganalisis perkembangan partai politik di Indonesia dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru Menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal Menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin Menganalisis perkembangan partai politik pada masa Orde Baru 	1. Perkembangan pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal 2. Latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1955 3. Pengaruh Dekrit Presiden bagi perkembangan pemerintahan dan perkembangan bangsa Indonesia 4. Usaha PKI dalam mencapai kejayaanya pada saat Presiden Soekarno berkuasa 5. Perkembangan partai politik pada masa Orde Baru	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. UTS dan UAS f. Fortopolio	a. Laporan diskusi b. LKS, Kuis c. Tes uraian, PG, dan Gambar d. Uraian refleksi	1. Bagaimana perkembangan pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal 2. Jelaskanlah latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1955 3. Apa pengaruh Dekrit Presiden bagi perkembangan pemerintahan dan perkembangan	2 jp	a. Sumber : <ul style="list-style-type: none"> I Wayan Badrika, 2004, <i>Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk kelas XII</i>, Jakarta : Erlangga Liddle, William 1992, <i>Partisipasi dan Partai Politik</i>, Jakarta: Pustaka utama Grafiti Marwati Djoened Poesponegoro dkk., <i>Sejarah, 1993, Sejarah Nasional Indonesia jilid VI</i>, Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka

	<p>tanah air dan menghargai bangsa sendiri sebagai warisan dari jasa para pahlawan.</p> <p>b. Ketrampilan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanamkan rasa solidaritas, kerjasama dalam kelompok, dan menghargai pendapat orang lain. 				<p>an bangsa Indonesia ?</p> <p>4. Bagaimana usaha PKI dalam mencapai kejayaanya pada saat Presiden Soekarno berkuasa ?</p> <p>5. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Orde Baru?</p>	<p>➤ Miriam Budiardjo, 2010, <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>b. Alat : Papan Tulis (whiteboard), LKS, Soal</p>
--	---	--	--	--	--	---

Yogyakarta, Agustus 2012
Guru Bidang Studi

Jaka Sujatmika

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas /Semester : XII IPS / 1
Pertemuan ke : 1
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit
Materi Pokok : Perkembangan partai politik di Indonesia dari Demokrasi Liberal sampai Orde Baru

I. Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

II. Kompetensi Dasar : Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.

III. Indikator

1. Kognitif

a. Produk

- Menganalisis perkembangan partai politik di Indonesia dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru

b. Proses

- Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
- Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin
- Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan partai politik pada masa Orde Baru

2. Afektif

a. Karakter

- Menanamkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa demokrasi

b. Keterampilan sosial

- Menanamkan rasa solidaritas, kerjasama dalam kelompok, dan menghargai pendapat orang lain.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Kognitif

a. Produk

- Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan partai politik di Indonesia dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru

b. Proses

- Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
- Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin
- Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan partai politik pada masa Orde Baru

2. Afektif

a. Karakter

- Siswa dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa demokrasi

b. Keterampilan sosial

- Siswa dapat menanamkan rasa solidaritas, kerjasama dalam kelompok, dan menghargai pendapat orang lain

V Materi Ajar :

- Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
- Perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin
- Perkembangan partai politik pada masa Orde Baru

VI. Metode Pembelajaran :

- Kombinasi Metode Pembelajaran (diskusi, presentasi, dan tanya jawab)

VII. Langkah-langkah Pembelajaran :

1. Kegiatan awal : 15 menit

A. Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam pembuka, dilanjutkan dengan pengkondisian kelas, berdoa, presensi.
- Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, melalui tanya jawab.

B. Motivasi :

- Guru memberikan pre test kepada siswa sebagai pembuka sebelum masuk pada materi inti. Pre test ini bertujuan untuk mengingatkan pengetahuan siswa sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari serta untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang dibahas.

Contoh soal pre test:

- ✓ Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
- ✓ Sebutkan partai-partai politik yang pernah ada di Indonesia?

C. Orientasi :

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Kegiatan Inti : 60 menit

A. Eksplorasi

- Guru menjelaskan gambaran umum tentang perkembangan politik dari Demokrasi Liberal sampai Orde Baru
- Guru membentuk kelompok dan memberikan materi diskusi kepada setiap kelompok untuk didiskusikan pada kelompoknya masing-masing secara kooperative.
 - Kelompok I : perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Liberal
 - Kelompok II : perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin

- Kelompok III : perkembangan partai politik pada masa Orde Baru
- Kelompok IV : sistem partai di Indonesia

B. Elaborasi :

- Siswa bergabung dengan kelompok masing-masing
- Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok

C. Kofirmasi :

- Siswa mampu mengemukakan hasil diskusi serta mengemukakan pendapat-pendapat yang berhasil ditemukan dalam diskusi tersebut.
- Siswa mampu merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lainnya dalam diskusi tersebut
- Siswa mampu merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lainnya dalam diskusi tersebut.

3. Kegiatan akhir : 15 menit

- Guru memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi yang dilaksanakannya
- Siswa diberi kesempatan untuk menulis dari hasil kesimpulan dari pembelajaran dan diskusi tersebut

VII. Sumber, alat dan bahan Pembelajaran

- Sumber Pembelajaran : Kurikulum KTSP dan perangkatnya, pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA – ESIS, buku sumber Sejarah SMA – ESIS
- Alat Pembelajaran : Papan tulis, whiteboard dan OHP
- Bahan Pembelajaran : Kertas Soal dan Lembar Kerja

IX. Tugas dan Penilaian

a. Penilaian Produk

Jenis tagihan : tes terstruktur

Soal :

1. Bagaimanakah perkembangan pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal ?
2. Jelaskanlah latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1955 ?

3. Apakah pengaruh Dekrit Presiden bagi perkembangan pemerintahan dan perkembangan bangsa Indonesia ?
4. Bagaimana usaha PKI dalam mencapai kejayaanya pada saat Presiden Soekarno berkuasa ?
5. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Orde Baru ?

b. Penilaian proses : Tugas mandiri tidak terstruktur

Siswa secara individu melakukan perbandingan antar partai politik dan menghubungkannya dengan partai politik saat ini.

Penilaian

1. Aspek kognitif (Terlampir)

2. Aspek Afektif (Terlampir)

Nilai Akhir 100% = 70% kognitif + 20% afektif + 10% psikomotorik

3. Aspek psikomotorik (Terlampir)

4. Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan lulus apabila dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75
- Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 75
- Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat keberhasilannya lebih dari 75

Yogyakarta, Agustus 2012

Guru Bidang Studi

Jaka Sujatmika

Lampiran Materi Pembelajaran

Negara di Eropa Barat menjadi pelopor dari lahirnya partai politik. Partai politik dijadikan alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengolahan negara, akan tetapi pada realita kehidupan bernegara seperti sekarang ini, partai politik sering disalahgunakan untuk mencapai kepentingan golongan. Sebenarnya masa kejayaan partai atau perkembangan partai politik terlihat pada masa demokrasi parlementer. Masa itu terlihat peran partai politik yang begitu dominan.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pada masa Demokrasi Liberal pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Pada tahun 1950 sampai 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem multi partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa Demokrasi Parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa Demokrasi Terpimpin.

2. Partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin secara perlahan peran partai politik menjadi tenggelam. Orde Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Soekarno menganggap partai politik tidak perlu.

Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru. Pada pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya menitik beratkan pada 3 gabungan kekuatan yaitu, Soekarno sendiri, militer, dan PKI. Sedangkan pada jaman Orde Baru, hanya memiliki 1 pusat kekuatan yaitu ABRI.

Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilai menghambat jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik dibandingkan dengan sistem ala Barat, ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktik pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang didalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun 1950an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula. Dalam penggambaran kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI.

3. Masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun

1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Baik antara masa Demokrasi Terpimpin dengan Orde Baru sama-sama menunjukkan pemerintahan yang otoriter namun caranya yang berbeda. Pada Orde Baru Golkar sebagai partai pemerintah mempunyai basis yang kuat sebagai partai tunggal yang dibuat dan dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu Golkar dalam setiap pemilihan umum menempati kedudukan paling tinggi dan menjadi partai juara atau pemenang. Di era Demokrasi Terpimpin terjadi perlombaan saling berebut pengaruh terhadap diri Presiden. Nyata benar bahwa, antara PKI dengan Angkatan Darat bersaing untuk memperebutkan pengaruh yang besar. Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kejayaannya karena Presiden Soekarno pada saat itu mempunyai hubungan istimewa dengan PKI. Sedangkan pada masa Orde Baru Golkar yang mendapat perlakuan istimewa serta mendapat hak yang khusus pula. Dengan kata lain Golkar dijadikan sebagai tangan kanan penguasa Orde Baru.

Lampiran Penilaian

1. Aspek Kognitif

a. Produk

- Teknik: Tes Tertulis
- Bentuk: Uraian
- Soal:
 1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya partai politik pada awal kemerdekaan Indonesia? (skor 25)
 2. Bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh para pendiri partai politik agar diterima oleh rakyat Indonesia? (skor 25)
 3. Bagaimana respon rakyat Indonesia mengenai pembentukan partai-partai politik dan apakah berpengaruh bagi kehidupan rakyat Indonesia? (skor 25)
 4. Mengapa tidak semua partai politik dapat bertahan lama dalam setiap masa pemerintahan? (skor 25)

Skor Total: 100

Ket: $N = \frac{\text{skor}}{100} \times 100$

b. Proses

Soal Diskusi:

1. Bagaimanakah perkembangan pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal ?
2. Jelaskanlah latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1955 ?
3. Apakah pengaruh Dekrit Presiden bagi perkembangan pemerintahan dan perkembangan bangsa Indonesia ?
4. Bagaimana usaha PKI dalam mencapai kejayaannya pada saat Presiden Soekarno berkuasa ?
5. Bagaimana perkembangan partai politik pada masa Orde Baru ?

- Kriteria penilaian proses:

No	Nama	Menghargai teman	Mengambil giliran	Mengajukan pertanyaan	Mempresentasikan hasil	Menjawab pertanyaan	Mendengarkan dengan aktif	jumlah
		1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1:5 dengan kriteria :

- Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman
- Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif, tetapi dapat menghargai teman
- Skor 3 : Pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- Skor 4 : Aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- Skor 5 : Aktif, sangat kooperatif, dan dapat menghargai teman

$$N = \frac{\text{Jumlah skor}}{30} \times 100\%$$

$$NA = \frac{\text{Nilai proses} + \text{Nilai produk}}{2}$$

Keterangan :

N = Nilai

NA = Nilai akhir

2. Aspek Afektif

- Teknik: Non Tes
- Bentuk: Instrumen Observasi
- Instrumen Observasi Skala Sikap

No.	Nama siswa	Aspek yang dinilai			Jumlah nilai	Rata-rata
		Semangat bekerja sama	Tanggung jawab	Tenggang rasa		
1.						
2.						
3.						

Keterangan:

Kriteria Penilaian:

Aspek Semangat Kerja

Nilai 3 : Baik

Mau bekerjasama dengan semua teman

Nilai 2: Sedang

Dalam bekerjasama kurang begitu baik

Nilai 1: Kurang

Tidak mau bekerjasama dengan teman

Aspek Tanggung Jawab

Nilai 3 : Baik

Rasa tanggung jawab tinggi

Nilai 2: Sedang

Kurang ada rasa tanggung jawab

Nilai 1: Kurang

Kurang ada tanggung jawab/seenaknya sendiri

Aspek Tenggang Rasa

Nilai 3 : Baik

Menghargai guru dan teman

Nilai 2 : Sedang

Kurang menghargai guru dan teman

Nilai 1 : Kurang

tidak menghargai guru dan teman

Ket: $N = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

3. Aspek Psikomotorik

- Teknik : Non Tes
- Bentuk : Instrumen Observasi Kerja
- Rambu-rambu skorsing

No.	Kriteria Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1.	Signifikasi Seberapa besar tingkat kesesuaian atau kebermankaan informasi yang diberikan dengan topik yang dibahas	Tidak ada tambahan informasi karena masih sama dengan buku.	Ada tambahan informasi, meskipun kurang tepat kebenarannya.	Informasi yang ditambahkan sangat sesuai dan benar
2.	Pemahaman Seberapa baik tingkat pemahaman peserta didik terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah yang disajikan?	Langkah yang disampaikan urut, tetapi belum memahami materi dan masih menjelaskan dengan bantuan teman dan membuka buku.	Langkah yang disampaikan urut, sudah dapat menjelaskan materi tanpa melihat buku, tetapi masih memutuhkan teman untuk menjelaskan.	Langkah yang disampaikan urut dan lengkap, serta dapat menjelaskan tanpa melihat buku maupun bertanya pada teman.
3.	Argumnetasi Seberapa baik alasan yang diberikan peserta didik terkait dengan permasalahan yang	Tidak ada mempertahankan pendapat dan tidak memiliki	mempertahankan pendapat, tetapi menolak kritik dari kelompok	mempertahankan pendapat kelompok dan mau

	dibicarakan?	pendirian tetap.	lain.	mendengarkan kritik dari kelompok lain.
4.	Responsif Seberapa besar kesesuaian jawaban yang diberikan peserta didik terkait dengan permasalahan yang dibicarakan?	Tidak serius dan hanya menjawab secara singkat serta tidak jelas.	Jawaban yang diberikan membingungkan dan belum menjawab pertanyaan yang diberikan.	Jawaban yang diberikan dapat menjawab pertanyaan, meski belum tentu benar.
5.	Kerjasama kelompok Seberapa besar anggota kelompok berpartisipasi dalam penyajian?	Hanya satu orang yang berpartisipasi.	Hanya sebagian dari anggota kelompok yang berpartisipasi.	Seluruh anggota kelompok yang berpartisipasi.
	Bagaimana setiap anggota kelompok merasa bertanggung jawab atas permasalahan kelompok?	Hanya satu orang yang selalu menjawab pertanyaan yang diajukan.	Hanya sebagian dari anggota kelompok yang bekerjasama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.	Seluruh anggota kelompok saling membantu menjawab pertanyaan yang diajukan.
	Bagaimana para penyaji menghargai pendapat dari kelompok lain	Tidak mau mendengarkan pendapat dari kelompok lain.	Mau mendengarkan pendapat dari kelompok lain, tetapi tidak sepenuhnya.	Mendengarkan pendapat dari kelompok lain dengan penuh perhatian.

Skoring: Total Skor Semua Aspek x Bobot 5

- Kriteria Penilaian Produk

No	Nilai angka	Nilai huruf	Keterangan
1.	80-100	A	Baik sekali
2.	66-79	B	Baik
3.	56-65	C	Cukup
4.	40-55	D	Kurang
5.	30-0	E	Gagal

